

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024? 2) Apa sanksi terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum masa Kampanye Pemilu Legislatif 2024?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye pemilu legislatif 2024 ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal pengawasan Bawaslu terhadap penindakan alat peraga sebelum masa kampanye ini Bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak hal tersebut pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara. yang berwenang hanya pemerintah daerah dalam hal penataan estetika kota dengan melibatkan Satpol PP dengan melakukan penindakan mencopot satu persatu baliho. 2) pada saat calon telah sebagai Daftar Calon Sementara sanksi yang dapat diberikan yaitu dari Pemerintah Daerah berdasarkan Perda Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan saat calon sebagai daftar calon tetap Bawaslu dapat memberikan sanksi yaitu sanksi Administrasi berupa peringatan sampai pada pencopotan alat peraga.

Kata Kunci : Pengawasan, Bawaslu, Kampanye, Pemilu Legislatif

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze Bawaslu's supervision of the installation of props before the 2024 legislative election campaign period. The problems in this research are 1) How are Bawaslu's supervision arrangements for the installation of props before the 2024 Legislative Election Campaign period? 2) What are the sanctions for violations of installing props before the 2024 Legislative Election Campaign period? The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the legal approach and the conceptual approach. The results of the discussion in this research show that 1) The installation of props before the 2024 legislative election campaign period is not in accordance with applicable laws and regulations, and in terms of Bawaslu's supervision of the enforcement of props before this campaign period, Bawaslu does not yet have the authority to take action against this matter. when the candidate is designated as a provisional candidate list. The only authority is the regional government in terms of arranging the city's aesthetics by involving Satpol PP by taking action to remove the billboards one by one. 2) when a candidate is on the Provisional Candidate List, the sanction that can be given is from the Regional Government based on the Regional Regulation on Order, Cleanliness and Beauty and when the candidate is on the permanent candidate list, Bawaslu can give sanctions, namely administrative sanctions in the form of warnings up to the removal of props.

Keywords: *Supervision, Bawaslu, Campaign, Legislative Election*